

Mayoritas partai politik di Indonesia terkungkung oleh oligarki politik, di mana kekuatan modal menjadi pelumas utama agar sebuah partai tetap bergerak. Komunitas Indonesia untuk Demokrasi menengarai setidaknya ada dua bahaya yang menyebabkan kondisi tersebut akan terus berlanjut.

Terbatasnya dukungan dari dana publik kepada partai politik dan belum teraturnya kewajiban iuran anggota partai politik menyebabkan partai politik sangat tergantung kepada para pemodal yang sanggup membiayai program-programnya.

"Kita berhadapan dengan gejala oligarki partai politik, di mana walaupun ada dana publik, pemimpin parpol tetap akan menolaknya, karena akan mengurangi ketergantungan partai politik, sekaligus akan mengurangi pengaruh mereka kepada parpol," kata Anggota KID Mohtar Mas'ood dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Alih-alih mendemokratisasi partai politik, oligarki yang semakin mengakar di tubuh partai justru akan mempertahankan kedudukan mereka sebagai pemodal sambil menciptakan semacam kartel di antara partai-partai besar.

"Dengan cara membatasi partisipasi partai kecil, khususnya di dalam pemilu, misalnya dengan menaikkan ambang untuk mengikuti pemilu. Jadi, legislasi digunakan untuk menggencet partai-partai kecil," ujarnya.

Lebih jauh lagi, menurut Mohtar, partai-partai besar hanya akan menghimpun kekuatan di antara mereka untuk menguasai negara sehingga pada tahapan tertentu dapat menggunakan instrumen negara untuk kepentingan kelompok mereka. "Di sini kita berhadapan dengan risiko kartelisasi," imbuhnya.

Sumber : [Berita Satu](#)